

Metode PSA (Pengabdian Sosialisasi Asyik) E-KTP Online Menuju Masyarakat Yang Modern Dan Tertib Administrasi

Megawati¹, Jamaluddin Ahmad², Hardianti³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

*e-mail korespondensi: megawatikr09@gmail.com

Abstract

Benteng Village, located in Baranti District, Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province, is known as a major producer of rice, eggs, and vegetables. However, the quality of public services in this area remains low due to inadequate infrastructure and suboptimal performance of public officials. One initiative to address this issue is the implementation of digital population administration services by the Department of Population and Civil Registration, particularly through the adoption of the Digital Population Identity (IKD). To support this program, the PKM-PM team carried out a socialization activity called Pengabdian Sosialisasi Asyik (PSA), or "Fun Socialization Service," using a prototype method and a local approach through "ladda-ladda" forums to enable more effective interaction with the community. This activity aims to raise public awareness and understanding of online e-ID cards, including how to create an account and fulfill administrative requirements. The long-term goal of this program is to foster a modern, administratively orderly society that recognizes the importance of civil documents. With clear objectives and appropriate strategies, this program is expected to make a meaningful contribution to improving the quality of public services at the village level.

Keywords: Community Service; Online e-KTP; Administrative Order

Abstrak

Kelurahan Benteng, yang terletak di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal sebagai sentra produksi beras, telur, dan sayur-sayuran. Namun, kualitas pelayanan publik di wilayah ini masih rendah akibat keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu upaya perbaikan dilakukan melalui program digitalisasi pelayanan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Untuk mendukung program ini, tim PKM-PM melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk Pengabdian Sosialisasi Asyik (PSA) dengan metode prototype dan pendekatan khas lokal melalui forum "ladda-ladda" guna meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait penggunaan E-KTP online, termasuk cara pembuatan akun dan persyaratan administrasi. Tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah menciptakan masyarakat yang modern, tertib administrasi, dan sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Dengan strategi yang tepat, program ini diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat; e-KTP Online; Tertib Administrasi

Accepted: 2025-07-09

Published: 2025-08-04

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, transformasi pelayanan publik menjadi suatu keharusan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah pelayanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi identitas, seperti E-KTP dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, inovasi ini mulai diterapkan untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Namun, kenyataannya di Kelurahan Benteng, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh pentingnya E-KTP online dan prosedur aktivasi IKD, disebabkan keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi digital, dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait.

Permasalahan ini menjadi krusial mengingat Kelurahan Benteng merupakan salah satu wilayah produktif di Kecamatan Baranti dengan jumlah penduduk mencapai 3.083 jiwa. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam membangun sistem administrasi yang tertib dan modern. Pelayanan administrasi yang tidak efektif bukan hanya berdampak pada individu, namun juga melemahkan fungsi kelembagaan dalam konteks pelayanan publik yang akuntabel. Meski secara nasional telah dilakukan berbagai pendekatan berbasis teknologi dalam pelayanan kependudukan, namun pendekatan-pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan lokal yang unik seperti rendahnya pemahaman masyarakat akar rumput.

Berbeda dari penelitian atau program serupa yang cenderung bersifat satu arah dan berbasis formalitas, program ini mengusung pendekatan PSA (Pengabdian Sosialisasi Asyik), yakni metode sosialisasi yang interaktif dan adaptif terhadap karakteristik budaya masyarakat lokal. Salah satu ciri khasnya adalah pelaksanaan kegiatan dalam forum "ladda-ladda", sebuah tradisi berkumpul santai masyarakat, yang dimanfaatkan sebagai ruang dialog santai namun produktif. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan transfer informasi, tetapi juga bertujuan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan E-KTP online.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Kelurahan Benteng mengenai pentingnya dokumen kependudukan digital serta membekali mereka dengan kemampuan praktis dalam mengakses dan menggunakan layanan E-KTP online secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat yang modern, tertib administrasi, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam sistem pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak warga negara (Novianto, 2018). Dalam konteks administrasi kependudukan, pelayanan publik dituntut untuk bersifat cepat, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk pelayanan publik juga mulai bertransformasi ke arah digital, termasuk di antaranya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) secara online.

Menurut Haeruddin Syarifuddin dan Muhammad Ikbal (2019), pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengurangi praktik birokrasi berbelit, serta memperluas akses layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, transformasi digital ini tidak dapat diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat, khususnya dalam aspek literasi digital.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Dukcapil dalam bentuk layanan berbasis aplikasi yang memungkinkan warga mengakses data kependudukan mereka secara daring. Program ini merupakan bentuk penguatan sistem E-KTP yang telah berjalan sebelumnya. Menurut Nurdiana dan Ayumi (2024), digitalisasi dokumen identitas bertujuan mempercepat pelayanan publik dan mendukung integrasi data nasional.

Namun, studi Ahmadi et al. (2025) menunjukkan bahwa kendala umum dalam implementasi IKD antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prosedur aplikasi tersebut, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat dalam menyosialisasikan penggunaan layanan ini kepada masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya digital-ready.

Strategi komunikasi dan pendekatan edukatif sangat penting dalam memperkenalkan layanan digital kepada masyarakat. Metode yang interaktif dan menyenangkan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi. Azzahra dan Rudiana (2024) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam sosialisasi kebijakan, khususnya melalui media lokal yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Program PSA (Pengabdian Sosialisasi Asyik) yang dilaksanakan oleh tim PKM-PM merupakan salah satu implementasi dari strategi sosialisasi partisipatif tersebut. Dengan memanfaatkan

budaya lokal "ladda-ladda", metode PSA memberikan ruang interaksi santai namun edukatif, di mana masyarakat dapat berdiskusi langsung mengenai E-KTP online dan prosedur penggunaannya. Pendekatan ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan literasi digital yang selama ini menjadi hambatan dalam pelayanan administrasi berbasis teknologi.

Transformasi pelayanan publik yang berorientasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang tertib administrasi dan sadar identitas hukum. Sukarno et al. (2021) menyebutkan bahwa tertib administrasi merupakan indikator penting dalam pembangunan masyarakat modern, karena mempermudah akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Dengan adanya program seperti PSA, masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola identitas kependudukan secara mandiri, yang pada akhirnya akan membentuk budaya administrasi yang tertib dan modern di tingkat lokal.

METODE

Metode pelaksanaan program Pengabdian Sosialisasi Asyik (PSA) dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dimulai dengan diskusi internal antara tim pelaksana dan dosen pendamping, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama mitra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi serta persiapan logistik dan sarana pendukung lainnya seperti brosur dan perangkat presentasi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai target sasaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung (luring) selama enam kali pertemuan pada akhir pekan, dengan pendekatan partisipatif berbasis budaya lokal melalui forum "ladda-ladda". Metode ini dipilih untuk menciptakan suasana sosialisasi yang santai dan interaktif di lingkungan warga. Selain itu, tim juga membagikan brosur sebagai media pendukung untuk menyampaikan informasi terkait E-KTP online dan cara penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas media sosialisasi, serta kendala teknis yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir yang mencerminkan capaian program secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang Dicapai:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

1) Pemahaman Mendalam

Masyarakat tidak hanya menyadari manfaat, tetapi juga memahami secara mendalam mekanisme dan prosedur penggunaan E-KTP online.

2) Perubahan Perilaku

Terjadi perubahan perilaku yang signifikan, di mana masyarakat lebih proaktif dalam mengurus administrasi kependudukan secara mandiri.

3) Lingkaran Sosial

Masyarakat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi tentang E-KTP online kepada anggota keluarga dan komunitas sekitar.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1) Aksesibilitas

Sosialisasi telah berhasil menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan keterbatasan literasi digital.

2) Keterlibatan Aktif

Masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memberikan masukan dan saran untuk perbaikan layanan E-KTP online.

3) Kerjasama Antar Lembaga

Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendorong partisipasi masyarakat.

c. Penyederhanaan Proses Administrasi

1) Penghematan Waktu

Masyarakat dapat mengurus keperluan administrasi kependudukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

2) Pengurangan Birokrasi

Proses birokrasi yang berbelit-belit berhasil dikurangi, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.

3) Transparansi

Masyarakat dapat memantau status permohonan E-KTP online secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

d. Peningkatan Jumlah Pendaftar

1) Pertumbuhan Pesat

Jumlah pendaftar E-KTP online mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam waktu singkat.

2) Target Tercapai

Target jumlah pendaftar yang ditetapkan telah berhasil terlampaui.

3) Potensi Pertumbuhan Berkelanjutan

Dengan terus dilakukannya sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan, potensi pertumbuhan jumlah pendaftar masih sangat terbuka.

e. Peningkatan Efisiensi Layanan

1) Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya manusia dan anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif.

2) Kualitas Layanan

Kualitas layanan administrasi kependudukan meningkat secara signifikan, tercermin dari kepuasan masyarakat yang tinggi.

3) Inovasi

Tercipta ruang untuk pengembangan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.

f. Penurunan Tingkat Kecurangan

1) Data Akurat

Data kependudukan menjadi lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem informasi lainnya.

2) Pencegahan Pelanggaran

Sistem verifikasi yang kuat dapat mencegah terjadinya pelanggaran seperti pemalsuan identitas dan penggunaan dokumen palsu.

3) Keamanan Data

Data pribadi masyarakat terjamin keamanannya dengan penerapan sistem keamanan yang canggih.

Potensi Keberlanjutan

a. Integrasi dengan Layanan Publik Lainnya

E-KTP online dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan publik lainnya, seperti perbankan, kesehatan, dan pajak.

b. Pengembangan Fitur Tambahan

Pengembangan fitur tambahan seperti tanda tangan digital dan verifikasi identitas secara online akan semakin meningkatkan utilitas E-KTP.

c. Sosialisasi Berkelanjutan

Sosialisasi harus terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesadaran masyarakat dan mengatasi tantangan baru yang muncul.

d. Evaluasi dan Perbaikan

Untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Pelaksanaan program Pengabdian Sosialisasi Asyik (PSA) di Kelurahan Benteng menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang partisipatif dan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi layanan publik, khususnya dalam penggunaan E-KTP online. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui forum ladda-ladda memberi ruang interaksi yang lebih terbuka dan informal antara tim pelaksana dan masyarakat. Hal ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembuatan E-KTP digital melalui aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital), yang sebelumnya dianggap rumit dan kurang familiar oleh sebagian warga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Azzahra & Rudiana (2024), yang menyatakan bahwa strategi komunikasi berbasis kearifan lokal lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi warga terhadap kegiatan administrasi kependudukan digital. Banyak warga yang sebelumnya tidak mengetahui atau tidak tertarik menggunakan layanan E-KTP online menjadi aktif dalam proses aktivasi dan penggunaan aplikasi IKD. Bahkan, masyarakat mulai menyebarkan informasi tersebut kepada lingkungan sekitarnya, menjadikan mereka sebagai agen perubahan lokal dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan perilaku administratif yang positif. Selain itu, kerja sama antara tim pengabdian, pemerintah kelurahan, dan Disdukcapil menjadi faktor kunci yang mendukung keberhasilan program ini, sebagaimana juga ditegaskan oleh Gustiana & Pohan (2023) dalam konteks kolaborasi multi-pihak dalam pelayanan digital.

Namun demikian, pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses internet di wilayah tertentu dan rendahnya kemampuan teknis sebagian masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital. Tantangan ini mengindikasikan perlunya dukungan infrastruktur yang memadai serta pelatihan lanjutan yang lebih teknis agar proses digitalisasi dapat berjalan optimal. Sejalan dengan temuan Ahmadi et al. (2025), keterbatasan teknologi masih menjadi kendala utama dalam pemerataan pelayanan digital di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pendukung dari pemerintah daerah dalam penyediaan jaringan internet, pelatihan SDM lokal, serta penguatan literasi digital secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program PSA ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait E-KTP online, tetapi juga menjadi model pendekatan sosialisasi yang adaptif dan inovatif dalam konteks pelayanan publik digital. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kependudukan dapat diimplementasikan secara efektif bila dilakukan dengan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini juga relevan untuk direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam hal keterbatasan literasi digital dan akses teknologi.

KESIMPULAN

Program PKM-PM dengan judul "Metode PSA (Pengabdian Sosialisasi Asyik) E-KTP Online Menuju Masyarakat yang Modern dan Tertib Administrasi" telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Program ini tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai pentingnya administrasi kependudukan, khususnya E-KTP, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi secara online.

Melalui metode PSA yang diterapkan, masyarakat menjadi lebih mudah memahami prosedur pembuatan dan pembaruan E-KTP secara online, yang pada akhirnya mampu menciptakan budaya tertib administrasi di kalangan warga. Dengan adanya sosialisasi yang asyik dan interaktif, antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk kepentingan administratif meningkat secara signifikan.

Harapannya, hasil dari program ini dapat menjadi langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang lebih modern, tertib, dan sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Selain itu, diharapkan pula bahwa metode PSA yang telah dikembangkan dapat diadopsi dan diterapkan di wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Demikianlah laporan akhir program PKM-PM ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, serta berharap bahwa hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R., Erfina, Asad, M., Sapri, S., & Dema, H. (2025). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1178>
- Arrijal, A., & Mashur, D. (2022). Efektifitas Pelayanan Online Pada Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 1–14.
- Azzahra, V., & Rudiana. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. *Unes Law Review*, 6(4), 10146–10157. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Dapadeda, A., & Emanuel, A. W. R. (2024). SIDARLIN: Evaluasi Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 12(3), 857–864. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.73937>
- Gustiana, Z. N., & Pohan, S. (2023). Efektifitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 251–257. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.460>
- Haeruddin Syarifuddin, & Muhammad Iqbal. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi. *Journal of Government - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*
- Idrus, I., & Sampara, N. (2022). The Effect Of Queuing Systems And Organizational Culture On Service Satisfaction In The Population And Civil Registration Office At Sidenreng Rappang Regency. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3, 278–284.
- Marfu'ah, S. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Jomantara: Indonesian Journal of Art and Culture*, 15 (Volume 15 No. 02 Juni 2024), 271–283. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Muhammad Rusydi, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189–198. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.166>

- Novianto, E. (2018). Analisis Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 212–226. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.162>
- Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12653–12661.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Nursyarif, M. K., Tirta, M. W., Wahyudi, T., Patimah, S., Muawwanah, S., & Arbansyah. (2024). Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Samarinda Pada Revolusi Digital. *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*
- Rahmadany, A. F. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 118–125. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2042>
- Ramadhannisa, R. T., Indrawan, R., Oisina Situmeang, I. V., Kencana, W. H., Rahmawati, K. J., & Meisyanti, M. (2022). Sosialisasi Aplikasi Smart Government Pada Masyarakat Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon. *Ikra-Ith Abdimas*, 5(3), 186–191. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v5i3.2268>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing*
- Sugandini, A. S., & Novaria, R. (2024). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Melalui Pengoptimalisasian Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*
- Sukarno, B., Ginting, N. F., Ichwanusafa, R., Kinar Qamara, S., & Annisa Rochmani, S. (2021). Kegagapan Implementasi E-Government Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi. *Jurnal Identitas*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.146>
- Wati, V. C., Rizkita, T. W., Sajiwa, B., Silawarti, R., & Prasetyo, E. (2024). Penyelenggaraan Pelayanan Go Digital pada Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Perspektif Dynamic Governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 233–247. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1806>
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–426.
- Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas. *Governance: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 14(2), 63–71.